

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Laporan Keuangan dan Auditing

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya.

Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Sehingga para *stakeholder* dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Adapun menurut Thomas (2013:35), menjelaskan pengertian laporan

keuangan adalah:

“laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodic disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu membuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (historis).”

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) laporan

keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

2.1.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik Laporan Keuangan adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Laporan informasi keuangan ini merupakan suatu entitas yang bisa menggambarkan kinerja entitas tersebut di suatu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan dan bermanfaat untuk mengambil keputusan bisnis. Selain daripada itu, laporan keuangan juga mempunyai sifat transparansi dan akuntabilitas terhadap perusahaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. “Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu.

2. Dapat Dipahami

Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat di mengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti semua informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dapat dipahami dan dimengerti.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode, untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau.

4. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Agar informasi dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut :

a. Penyajian jujur

Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari pernyataan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disampaikan secara jujur di setiap

transaksi atau peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar.

b. Laporan keuangan harus Subtansial

Substansial artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan subtansial dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.

c. Laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat artinya informasi akuntansi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi karena pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan.

d. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan.”

Sedangkan menurut Rahman Pura (2013:11) karakteristik merupakan ciri

khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. “Dapat dipahami Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai dengan aktivitas ekonomi dan bisnis.
- b. Relevan Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dan mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.
- c. Keandalan/Reliabilitas Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tepat.
- d. Dapat dibandingkan Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
- e. Netral Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.
- f. Tepat waktu Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai

dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut.

- g. Lengkap Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembaca.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa di dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya jika laporan keuangan yang disajikan tersebut mudah dipahami dan relevan atau bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu, netralitas (informasi keuangan yang disajikan tidak hanya berguna untuk kebutuhan satu pihak saja akan tetapi untuk semua pihak), serta laporan keuangan antar periode dapat diperbandingkan sehingga dapat teridentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.1.3 Pengertian Audit Secara Umum

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:2) pengertian audit adalah :

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Sedangkan Mulyadi (2014:9) mendefinisikan audit adalah :

“Pengauiditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4), pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut”.

Dari definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan atas bukti informasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis, dan harus dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Dalam hal ini seorang auditor harus mengetahui apakah laporan yang disajikan telah didukung oleh bukti-bukti memadai dan pelaksanaan aktivitas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan tujuan yang direncanakan.

2.1.1.4 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba di samping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahapan kegiatan yang hendak dilaksanakan harus direncanakan terlebih dahulu.

Tak hanya itu, semua tahapan kegiatan tersebut juga perlu dianalisis dan diteliti secara seksama oleh mereka yang berkompeten. Semakin besar suatu perusahaan, maka persoalan yang dihadapi perusahaan juga cenderung semakin rumit dan tanggung jawab yang dipikul oleh manajemen juga semakin besar.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah :

“Tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan

keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Menurut Arens dkk (2015:168) : Tujuan audit adalah

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Dapat diinterpretasikan tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit.

2.1.1.5 Tahap-tahapan Audit Laporan Keuangan

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

Adapun tahap Audit laporan keuangan artikel Jurnal Entrepreneur (<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-audit-laporan-keuangan-dari-pengertian-tujuan-dan-tahapan-nya/>) sebagai berikut:

1. “Penerimaan Perikatan Audit

Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal audit maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang dibuat dan disetujui bersama. Manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor dan auditor menyanggupi

audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Bentuk perikatan ini dalam bentuk surat perikatan audit.

Tahap pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Namun, untuk memutuskannya auditor juga perlu mempertimbangkan hal-hal seperti integritas manajemen, mengidentifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Jadi dalam menentukan untuk menerima audit atau tidak memerlukan pertimbangan yang banyak bukan semata-mata mendapatkan klien saja.

2. Perencanaan Proses Audit

Tahapan audit laporan keuangan berikutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit.

Meskipun pada praktiknya tidaklah sesingkat hal tersebut. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit tersebut memiliki hal atau bagian lain yang harus dikerjakan lagi. Sehingga rencana audit laporan keuangan pun dibuat dengan benar dan tepat.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Setelah membuat perencanaan audit, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Singkatnya pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain.

Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan.

4. Pelaporan Audit

Setelah melakukan pengujian audit, tahap berikutnya yang sekaligus jadi tahap terakhir audit laporan keuangan adalah pelaporan audit. Laporan audit merupakan hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya.

Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi lainnya.”

Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk

memutuskan dan membuat laporan ini harus hati-hati. Jika tidak maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak berwajib.

2.1.1.6 Jenis-jenis Opini Audit Laporan Keuangan

Opini audit menurut Kamus Standar Akuntansi (Tobing, 2004)

“Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.”

Menurut Abdul Halim (2013: 73), yang dimaksud dengan opini audit adalah:

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguankeraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas”.

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri darlima jenis yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan

bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

- d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
 - b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
 - c. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
 - d. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
 - e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
 - f. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:

- a. Bukti kurang cukup
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup
- c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:

- 1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
- 2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun

perubahan dalam prinsip akuntansi.

4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

Sedangkan berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis-jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan yang diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan

Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan atau audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Dari penjelasan di atas, penulis menginterpretasikan bahwa adanya perbedaan jenis opini audit yang diberikan oleh Standar Profesional Akuntan (PSA 29) dengan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29) terdapat lima jenis opini audit yang diberikan yaitu : 1) Opini wajar tanpa pengecualian, 2) Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, 3) Opini wajar dengan pengecualian, 4) Opini tidak wajar, dan 5) Opini tidak memberikan pendapat. Sedangkan, menurut BPK ada empat jenis opini audit yang diberikan yaitu : 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian, 2) Pendapat wajar dengan pengecualian, 3) Pendapat tidak wajar, 4) Pernyataan menolak memberikan pendapat.

2.1.1.7 Standar Auditing

Menurut Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam

melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.”

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2011:42) menyatakan bahwa :

“Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti”.

Adapun standar Auditing yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) terbagi menjadi 3, sebagai berikut:

1. Standar Audit Umum

Standar umum merupakan standar audit yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar umum mencakup tiga bagian yang sangat vital pada auditing.

a. Bagian pertama

Bagian pertama ini merupakan keharusan yaitu audit dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis dalam melakukan tugas seorang auditor. Pada bagian ini diharapkan seorang auditor dapat selalu bertindak profesional sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan pada bidang audit. Keahlian auditor bisa diperoleh melalui pendidikan formal dan dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan saat mengikuti pelatihan teknis.

b. Bagian kedua

Bagian yang kedua dari standar umum audit yaitu, auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan (independensi). Pada standar umum ini, auditor wajib bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh oknum tertentu karena pekerjaannya sangat berguna untuk kepentingan umum.

Masyarakat umum harus memberikan kepercayaan atas sikap independensi yang dimiliki auditor, karena sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Selain itu, seorang auditor harus bersikap intelektual dan jujur dalam mengemban profesi sebagai auditor. Profesi akuntan publik telah menetapkan aturan yang disebut sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia agar setiap anggota dapat menjaga diri dari kehilangan kepercayaan dan persepsi independensi dari masyarakat.

2. Standar Audit Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan laporan merupakan standar audit yang berisi tentang

sikap dan pengetahuan yang wajib dimiliki seorang auditor publik (auditor). Standar ini terdiri dari 3 point.

a. Bagian pertama

Point yang pertama dari standar pekerjaan lapangan yaitu, sebagai tenaga profesional, maka seluruh pekerjaan harus dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Pada poin ini, penyerahan tanggung jawab dan penunjukkan secara dini pada auditor independen bisa memberikan banyak manfaat bagi auditor maupun klien. Semakin dini auditor ditunjuk, maka akan memberikan kemandirian bagi auditor untuk merencanakan beberapa hal yang terkait dengan pekerjaan.

b. Bagian kedua

Point kedua yaitu, tak hanya memperhatikan standar auditing saja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. Setiap auditor harus memiliki pemahaman tentang pengendalian internal untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur dan memahami desain pengendalian yang relevan. Dengan audit atas laporan keuangan, maka akan dapat diketahui kelayakan dari pengendalian internal tersebut untuk dapat dioperasikan.

c. Bagian ketiga

Point ketiga yang ketiga merujuk pada bukti audit yang berkompetensi harus didapatkan dari inspeksi terhadap pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi untuk dasar yang relevan sehingga dapat menghasilkan pernyataan pendapat dari laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor independen harus memberikan pendapat atas laporan keuangan yang meliputi usaha untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Tindakan ini bersifat sangat variatif atas pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Auditor harus dapat menyimpulkan keseluruhan audit terhadap kompetensi bukti dengan objektivitas, relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan bukti lainnya.

3. Standar Pelaporan Auditing

a. Bagian pertama

Standar pelaporan auditing terdiri dari empat point. Yang pertama yaitu, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini tidak mengharuskan auditor menyatakan tentang fakta, namun mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan mengenai kesesuaian dalam penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk

membatasi praktik akuntansi.

b. Bagian kedua

Point yang kedua dari standar pelaporan auditing merujuk pada hasil laporan auditor yang harus bisa menunjukkan konsistensi jika terjadi ketidakkonsistenan pada penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang sebelumnya. Standar ini merujuk pada standar konsistensi yang bertujuan untuk menuntut auditor independen agar dapat memahami antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Jika terjadi kekurangan konsistensi, maka penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan.

c. Bagian ketiga

Point yang ketiga yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Penyajian laporan keuangan harus berisi informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai atas hal material yang meliputi bentuk, susunan, isi laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Auditor juga harus mampu memastikan beberapa hal tertentu yang diungkapkan sehubungan dengan keadaan yang diketahui saat dilaksanakan audit.

d. Bagian keempat

Poin keempat yaitu, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara menyeluruh atau pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Jika pendapat dari keseluruhan tidak bisa diberikan, maka alasan harus ditanyakan. Pada kondisi ini, laporan auditor harus menyajikan petunjuk yang jelas tentang pekerjaan audit yang berhasil dilaksanakan. Standar pelaporan auditing ini bertujuan untuk mencegah kesalahan penafsiran akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Auditor harus mempunyai pengetahuan audit yang cukup. Pengetahuan (*knowledge*) itu penting untuk dapat memahami relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh. Selanjutnya informasi tersebut menjadi bukti yang kompeten dalam penentuan opini audit.

Menurut Sri Lastanti (2005) mendefinisikan

“kompetensi atau keahlian adalah keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.”

Sedangkan Menurut Dwi Ratnadi dan Eka Desyanti (2006) mendefinisikan:

“kompetensi adalah keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pengertian kompetensi adalah pengetahuan atau keahlian suatu individu yang mendukung seseorang dalam melakukan tugasnya sehingga dengan keterampilannya tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kompetensi bisa diperoleh melalui pendidikan, baik formal maupun non formal dan bisa juga diperoleh melalui pengalaman.

2.1.2.2 Sudut Pandang Kompetensi Auditor

Adapun kompetensi menurut De Angelo (2003:26) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim, dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas mendetail berikut ini :

1. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien.

Selain itu diperlukan pula pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor

yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik .

2. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten,2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, perseistensi, skeptimisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan presentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al 1998, lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit.

KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo,1981). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

2.1.2.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

Adapun beberapa karakteristik kompetensi menurut Lyle dan Spencer (2004:92) terdapat empat karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut :

1. “Motif (Motives) Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. Karakteristik (Traits) Karakteristik adalah karakteristik fisik-fisik dan respons-respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Pengetahuan (Knowledge) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidangbidang konten tertentu.
4. Keterampilan (Skill) Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik, mental.”

Selain itu Indira Jayanti (2012) mengatakan karakteristik kompetensi yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Karakteristik kompetensi di kelompokkan menjadi :

1. “Komponen pengetahuan, yaitu merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. Komponen pengetahuan meliputi pengetahuan umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup dan relevan, selalu berusaha untuk tahu, mempunyai visi.
2. Ciri-ciri psikologis, yaitu merupakan self-presentation-image attribute of experts seperti : rasa percaya diri, bertanggung jawab, ketekunan, ulet dan energik, cerdik dan kreatif, adaptasi, kejujuran, kecekatan.
3. Kemampuan berpikir, yaitu merupakan kemampuan untuk mengakumulasi dan mengolah informasi, seperti : berpikir analitis dan logika, cerdas, tanggap dan berusaha menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci.
4. Strategi penentuan keputusan baik formal maupun informal yang akan membantu dalam membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian dalam mengatasi keterbatasan manusia, seperti : independen dan obyektif, integritas.
5. Analisis tugas yang banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman audit dan analisis tugas ini akan mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan seperti: ketelitian, tegas, profesional dalam tugas, keterampilan teknis, menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas dan idealisme.”

Berdasarkan Uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa karakteristik kompetensi mencakup komponen-komponen kompetensi seperti yang dikatakan Lyle dan Spencer (2004:92).

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Independensi Auditor

Untuk menilai suatu laporan keuangan dikatakan wajar dan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan, maka diperlukan tenaga independen dari pihak eksternal untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Seorang auditor harus bersikap independen terhadap manajemen dan stakeholder perusahaan sehingga dapat dianggap objektif dan dapat dipercaya.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2012:74) menyatakan bahwa :

“Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit”.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Selanjutnya menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi adalah sebagai berikut :

b. *“Independence in fact*

In fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu mentaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa professional practice framewrok of internal auditor, jika tidak demikian internal audior *in fact* tidak independen.

c. *Independence in appearance*

In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.

d. *Independence in mind*

In mind, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit adjustment

yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan findings tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan. In mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

2.1.3.2 Aspek-aspek Independensi Auditor

Menurut Taylor (1997), ada dua aspek independensi yaitu:

1. “Independensi sikap mental (*independence of mind/ independence of mental attitude*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
2. Independensi penampilan (*image projected to the public/ appearance of independence*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.”

Dalam penelitian Mayangsari (2003), ada enam faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, salah satunya adalah jasa-jasa lain selain audit yang dilakukan oleh auditor bagi klien. Seringkali manajemen klien meminta kantor akuntan publik untuk memberikan jasa lain selain jasa audit. Pemberian jasa lain selain jasa audit dapat menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah akuntan publik tersebut dapat mempertahankan independensinya.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mengganggu Independensi Auditor

Secara garis besar, standar-standar pemeriksaan seperti GAAS (General Accepted Auditing Standard) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) menyatakan ada tiga faktor gangguan yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa yaitu gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat eksternal dan gangguan yang bersifat organisasi. Para auditor, termasuk konsultan yang dipekerjakan dan tenaga ahli serta spesialis internal yang melaksanakan tugas audit, perlu memiliki pertimbangan terhadap tiga macam gangguan, yaitu sebagai berikut:

a. Gangguan yang bersifat pribadi

Gangguan yang bersifat pribadi merupakan suatu keadaan dimana auditor secara individu tidak bisa untuk tidak memihak, atau dianggap tidak mungkin tidak memihak. Gangguan yang bersifat pribadi ini dapat berlaku bagi auditor secara individu dan juga berlaku bagi organisasi. Gangguan independensi yang bersifat pribadi, antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan dinas, profesi, pribadi, atau keuangan yang mungkin dapat menyebabkan seorang auditor membatasi pengungkapan temuan audit, memperlemah atau membuat temuan auditnya menjadi memihak salah satu pihak.
2. Prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan audit menjadi berpihak kepada salah satu pihak.
3. Pada masa sebelumnya memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diaudit.
4. Kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau social, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
5. Pelaksanaan audit oleh seorang auditor yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diaudit.
6. Pelaksanaan audit oleh seorang auditor, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atau lembaga/ unit kerja atau program yang diaudit.

b. Gangguan yang bersifat eksternal

Gangguan yang bersifat eksternal bagi organisasi/ lembaga audit dapat membatasi pelaksanaan audit atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat dan kesimpulan auditnya secara independen dan objektif. Gangguan ini antara lain sebagai berikut:

1. Campur tangan atau pengaruh pihak eksternal yang membatasi atau mengubah secara tidak semestinya terhadap lingkup audit.
2. Campur tangan pihak eksternal terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit, atau dalam pemilihan transaksi yang harus diperiksa.
3. Campur tangan pihak luar terhadap organisasi lembaga audit mengenai penugasan, penunjukkan dan promosi staff pelaksana audit.
4. Pembatasan terhadap sumber yang disediakan bagi organisasi lembaga audit tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
5. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan auditor terhadap isi yang sesungguhnya dari suatu laporan audit.

c. Gangguan yang bersifat organisasi

Independensi para auditor pemerintah dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintah, tempat auditor tersebut ditugaskan, dan juga dipengaruhi oleh audit yang dilaksanakannya, yaitu apakah mereka melakukan audit internal atau audit terhadap entitas lain.

2.1.3.4 Faktor-faktor Luar yang Mempengaruhi Independensi Auditor

Menurut Ana Wulandari (2013:17) ada 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu :

1. Lama hubungan dengan klien (*Audit Tenure*)

Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Sebaliknya penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien.

2. Tekanan dari klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika

auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya.

d. Telaah dari rekanan auditor

Peer review sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. *Peer review* dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, Kantor Akuntan Publik yang direview dan auditor yang dalam tim *peer review*. Manfaat yang diperoleh dari *peer review* antara lain mengurangi risiko litigasi, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan *competitive advantage* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan.

e. Jasa non audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa attestasi melainkan juga jasa non attestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan.

Kusharyanti (2002:29) dalam Ana Wulandari (2013:21). Adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit. Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian. Barkes dan Simnet (1994) dalam Ana Wulandari (2013:21).

2.1.3.5 Indikator Independensi Auditor

Menurut Boynton (2006), beberapa indikator independensi profesional antara lain:

- A. “Independensi dalam program audit
 - 1. Bebas dari intervensi manajemen atas program audit
 - 2. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit
 - 3. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit
- B. Independensi dalam verifikasi
 - 1. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan

2. Mendapat kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit
 3. Bebas dari segala usaha manajemen yang ditujukan untuk membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi perolehan barang bukti
 4. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit
- C. Independensi dalam pelaporan
1. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan
 2. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit
 3. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor
 4. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit”

2.1.4 EDP (Electronic Data Processing) Audit

2.1.4.1 Pengertian EDP Audit

EDP atau komputerisasi merupakan rangkaian kegiatan dengan menggunakan komputer untuk mengubah informasi mentah (data) menjadi informasi yang berguna (Purwono, 2004). Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari proses pemasukkan data, penyimpanan, pengolahan, proses menghasilkan laporan, dan pengendalian.

Dalam penelitian Rukmini (2008), EDP merupakan nama yang diberikan untuk aplikasi berbasis computer, manipulasi atau transformasi simbol-simbol seperti angka dan abjad untuk tujuan meningkatkan kegunaannya.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, EDP Audit memiliki definisi bahwa bila suatu komputer dengan tipe atau ukuran apapun digunakan dalam pengolahan informasi keuangan suatu entitas membawa dampak yang signifikan bagi audit, terlepas apakah komputer tersebut dioperasikan oleh entitas tersebut

atau oleh pihak ketiga (IAI SA). Terdapat beberapa pendapat lain, diantaranya adalah:

Menurut Basamalah (1995) EDP audit adalah:

“Auditing EDP adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer perusahaan mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif, dan menggunakan aktiva perusahaan secara tepat.”

Sedangkan Menurut Alvin Ricardo (2012) EDP audit adalah:

“ EDP adalah teknologi berbasis komputer yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam era globalisasi bagi organisasi atau perusahaan”.

Dari defenisi diatas terdapat hubungan yang erat antara komputer dengan EDP karena komputer adalah alat yang menjalankan semua fungsi dari EDP, tanpa komputer maka pemrosesan data secara otomatis tidak dapat dilakukan. Jadi dalam EDP mutlak diperlukan adanya jalinan kerjasama yang harmonis dan terpadu antara peralatan pengolahannya (komputer), tenaga pelaksana, serta prosedur pengolahan data.

2.1.4.2 Tahapan EDP Audit

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012: 226-227) menjelaskan bahwa :

“Tahapan–tahapan dalam audit sistem informasi pada prinsipnya sama dengan audit pada umumnya. Tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan yang menghasilkan suatu program audit yang sedemikian rupa. Dengan demikian, pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien, dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang disepakati. Pada tahap perencanaan ini, penting sekali menilai aspek kontrol internal yang dapat memberikan masukan terhadap aspek resiko yang pada akhirnya akan menentukan luasnya pemeriksaan dan akan terlihat pada audit program, selanjutnya, pengumpulan bukti (evidence), pendokumentasian bukti tersebut, dan mendiskusikan dengan auditee tentang temuan jika ditemukan masalah yang memerlukan tindakan perbaikan dari auditee. Terakhir adalah membuat laporan audit. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proses pelaksanaan EDP audit tidak berbeda dengan proses audit pada umumnya.”

Dalam buku panduan Atlas, PPPK dan IAPI (2020:3) dijelaskan bahwa pelaksanaan EDP Audit meliputi:

1. Persiapan
 - a. Auditor mengisi informasi yang tertera pada kertas kerja pemeriksaan Pre-Engagement. Informasi ini memuat penyesuaian jam kerja audit, identitas auditor dan klien, serta perikatan yang akan dilangsungkan dalam surat perikatan, standar akuntansi klien, pernyataan independensi dan komunikasi dengan auditor terdahulu terkait isu laporan keuangan terdahulu.
 - b. Selain itu auditor juga mengisi informasi pada bagian ini auditor diminta untuk menentukan materialitas awal dengan menggunakan metode ICQ (*Internal Control Questionnaires*), menentukan prosedur analisis awal yang digunakan untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari satu akun yang menggunakan analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan sebagai kertas kerja pendukung. Selanjutnya adalah kertas kerja pemahaman entitas dan lingkungan yang memuat informasi umum mengenai bisnis klien dan aspek legalitas dari bisnis klien dan resiko lainnya diantaranya adalah *inherent risk, control risk, dan risk of material misstatement*.
2. Pelaksanaan
 - a. Proses Audit dilaksanakan secara elektronik melalui *Audit Tool And Link Archive System*. Proses audit ini tidak berbeda dengan audit pada umumnya hanya saja kertas kerja tidak berbentuk kertas fisik (*paperless*) melainkan merupakan dokumen elektronik yang terhubung satu sama lain.
 - b. Auditor maupun pihak terkait dapat mengakses informasi yang menjadi dasar pemberian opini atau audit *judgement* pada *platform* ATLAS.

2.1.4.3 Teknik EDP Audit

Ahmad Yani (2009:9) menjelaskan bahwa ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan *Electronic Data Processing* (EDP), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengujian dengan data simulasi
Teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap paling efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Beberapa program aplikasi diuji kemampuannya dalam memproses data hingga dapat diketahui apakah program berjalan secara benar atau ditemukan kesalahan

atau penyimpangan. Dengan melakukan pengujian data akan didapat bukti yang konkret mengenai keandalan sistem/program dalam memproses suatu transaksi.

2. **Pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu**
Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya (transaksi aktif) dengan cara memberikan suatu kode khusus. Pemeriksa dapat membandingkan hasil pengujian dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian pemeriksa dapat menilai keandalan program aplikasi dan mengetahui apakah program aplikasi telah dilengkapi dengan pendeteksian kesalahan (*error detection*). Teknik ini sangat cocok sistem pengolahan *online* maupun *batch processing*.
3. **Simulasi Pararel**
Dengan teknik ini pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Hasil pemrosesan simulasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil pemrosesan sesungguhnya yang telah dilakukan oleh objek pemeriksaan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui apakah program/sistem yang dipakai telah benar atau terdapat kesalahan/penyimpangan.
4. **Pemasangan Modul/Program Pemeriksaan**
Pemeriksa dapat memasang suatu modul/program pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Transaksi yang diolah oleh program aplikasi kemudian akan dicek oleh modul pemeriksaan yang telah dipasang kedalam program aplikasi yang selanjutnya akan dicatat kedalam suatu *log* pemeriksaaan. Pemeriksa dapat menyimpulkan apakah program aplikasi berjalan baik tanpa ada penyimpangan dari catatan *log* yang dicetak secara berkala.
5. **Pemakaian Perangkat Lunak**
Khusus untuk pemeriksaan dengan memakai perangkat lunak yang disusun khusus untuk pemeriksaan (*audit software*) pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Beberapa *audit software* yang biasa dipakai antara lain: *Generalized Audit Software*, *Audit Command Language (ACL)*, *Audassist*, *IDEAY*.
6. **Metode tracing**
Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program/sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan. Dengan metode ini pemeriksa mencetak daftar instruksi program yang dijalankan sehingga dapat ditelusuri apakah suatu instruksi telah dijalankan selama proses.
7. **Metode Pemetaan (*Mapping*)**
Pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Dengan metode ini dapat ditunjukkan suatu bagian program aplikasi yang dapat dimasuki pada saat dijalankan sehingga dapat diketahui bagian mana

dari program tersebut yang sedang melakukan proses dan bagian mana yang tidak sedang melakukan proses. Dengan diketahuinya bagian-bagian yang sedang bekerja dan bagian-bagian yang tidak sedang bekerja tersebut maka dapat dipisahkan kode-kode yang tidak dikehendaki tadi kemudian menghapusnya.

Apabila tingkat pemakaian sistem EDP audit dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah *audit through the computer* dan *audit with computer* atau lebih dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Auditing Technique (CAAT)* dan *ACL (Audit Command Language)*.

2.1.4.4 Metode EDP Audit

Gododiyoto (2007:451-458) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan metode audit yang berkaitan dengan komputer, antara lain:

1. *Auditing around the computer*
Auditing around the computer merupakan suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai *black box*, maksudnya metode ini tidak menguji langkah-langkah proses secara langsung, tetapi hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Kelemahan dari pendekatan ini jika lingkungan berubah, maka kemungkinan sistem itu berubah dan perlu penyesuaian sistem, sehingga auditor tidak dapat menilai apakah sistem masih berjalan dengan baik. Keunggulan dari pendekatan ini adalah pelaksanaan audit lebih sederhana, dan bagi auditor yang memiliki pengetahuan yang minim di bidang komputer dapat dilatih dengan mudah untuk melaksanakan audit.
2. *Auditing through the computer*
Auditing through the computer merupakan suatu pendekatan audit yang berfokus pada komputer dengan membuka *black box* dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah dapat meningkatkan kekuatan terhadap pengujian sistem aplikasi secara efektif dimana ruang lingkup dan kemampuan pengujian yang dilakukan dapat diperluas sehingga tingkat kepercayaan terhadap keandalan dari pengumpulan dan pengevaluasian bukti dapat ditingkatkan. Kelemahan pendekatan audit ini diantaranya biaya yang dibutuhkan relatif tinggi serta membutuhkan keahlian dari sisi teknik secara mendalam.
3. *Auditing with the computer*

Terdapat 2 (dua) istilah yang perlu dijelaskan dalam audit yang berkaitan dengan computer, yaitu:

- a. *Auditing with the computer*
Auditing with the computer merupakan suatu pendekatan audit dengan menggunakan komputer sendiri (*audit software*) untuk membantu melaksanakan langkah-langkah audit.
- b. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
 TABK adalah lebih khusus lagi, yaitu menggunakan komputer *evidence collection* atau bahkan didalam *audit evidence collection*. Teknik dengan metode ini sangat berguna untuk selama pengujian substantif atas *file* dan *record* suatu perusahaan. Sebaliknya, teknik auditing melalui komputer adalah teknik yang membantu dalam pengujian ketaatan.

2.1.5 Pertimbangan Materialitas Salah Saji Dalam Laporan Keuangan

2.1.5.1 Definisi Pertimbangan Materialitas Salah Saji

Secara umum materialitas salah saji adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley (2008:320)

definis pertimbangan materialitas salah saji yaitu:

“Pertimbangan materialitas salah saji merupakan jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana.”

Situasinya akan berubah total bila jumlahnya begitu signifikan sehingga keseluruhan laporan keuangan akan dipengaruhi secara material. Dalam kondisi ini, auditor perlu menolak memberikan pendapat atau menerbitkan pendapat tidak wajar, tergantung pada sifat salah saji tersebut. Dalam situasi-

situasi yang tingkat materialitas salah sajinnya lebih rendah, akan lebih tepat jika menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian.

Mulyadi (2002) berpendapat bahwa :

”Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Pertimbangan tingkat materialitas sangat penting dalam audit laporan keuangan karena auditor tidak dapat memberikan jaminan (guarantee) mutlak bahwa auditor akan menemukan semua salah saji.”

Maka dapat diinterpretasikan jika auditor menetapkan pertimbangan materialitas salah saji untuk membantu merencanakan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai salah saji, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan.

2.1.5.2 Konsep Materialias Salah Saji Dalam Laporan Keuangan

Houghton *et al.*, (2011) mengungkapkan konsep materialitas salah saji

“Konsep materialitas salah saji penting selama proses audit, mulai dari perencanaan audit sampai pada mengevaluasi hasil pengujian audit. Pertimbangan profesional menentukan apa yang dianggap sebagai bahan pada setiap fase ini proses audit”

Arens (2005;234) menyatakan konsep materialitas menggunakan tiga tingkatan dan mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, antara lain:

1. “Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah satu saja laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.
2. Jumlahnya material. Tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan berguna sehingga tetap berguna.
3. Jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran tingkat laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.”

. Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan beberapa jumlah kekeliruan atau salah saji yang auditor bersedia untuk menerimanya dalam laporan keuangan, namun auditor tetap dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan tidak berisi salah saji material.

2.1.5.3 Penetapan Pengungkapan Materialitas Salah Saji

Menurut Ekawati (2011) mengungkapkan penetapan materialitas salah saji

“Penetapan tingkat materialitas membantu auditor dalam merencanakan bukti yang cukup dalam proses pengauditan. Jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang rendah, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan lebih banyak dalam proses pengauditan.”

Menurut Arens (2008) langkah mempertimbangkan materialitas salah saji sebagai berikut:

1. Menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas salah saji
Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas salah saji adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan.

Auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang disebutkan dengan pertimbangan tentang materialitas yang direvisi. Hal ini terjadi karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas salah saji adalah materialitas salah saji yang memiliki konsep yang relatif, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas, dan faktor – faktor kualitatif.

Pertimbangan awal mengenai materialitas adalah jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Adapun penetapan

materialitas sendiri bertujuan untuk membantu auditor merencanakan bahan bukti yang cukup.

Seorang auditor eksternal dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi ada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan.

Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas salah saji dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah, informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut.

2. Mengalokasikan pertimbangan tentang materialitas kedalam segmen
Hal ini perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti persegmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu itu sebagai salah saji yang dapat ditoleransi.
3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen
Salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Salah saji yang mungkin terbagi menjadi dua jenis yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun, contohnya adalah perbedaan estimasi penyisihan piutang tak tertagih atau kewajiban garansi. Jenis kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi, contohnya adalah auditor menggunakan salah saji yang ditemukan yaitu 6 dari jumlah sampel 200 untuk mengestimasi total salah saji yang mungkin dalam persediaan. Total ini disebut estimasi atau proyeksi atau ekstrapolasi karena hanya sampel yang diaudit, bukan keseluruhan populasi.
4. Memperkirakan salah saji gabungan
Jumlah salah saji yang diproyeksikan dalam langkah ketiga untuk setiap akun kemudian digabungkan dalam kertas kerja.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Kompetensi, Independensi dan EDP Audit

Menurut *Webster`s Ninth Collegiate Dictionary* (1983) dalam Sri Lastanti (2005), kompetensi atau keahlian adalah keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Menurut Trotter (1986) dalam Sri Lastanti (2005) ahli adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan secara cepat, mudah, intuisi dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Kemampuan auditor salah satunya seperti berkemampuan dalam teknologi, dan berperilaku baik dalam mengaudit salah satunya seperti tanggung jawab kepada publik. Senada dengan penjelasan Herusetya (2010:5) Auditor diharuskan menjalani pelatihan profesional agar dapat menguasai suatu sistem yang berbasis komputer agar penugasan dan dalam pemeriksaan akuntansi dapat berjalan dengan baik. Penugasan yang dihadapi auditor selanjutnya mendorong auditor untuk semakin memerdayakan seluruh perangkat sistem informasi teknologi elektronik yang tersedia, baik dalam komunikasi dan pengambilan keputusan antar team audit, melakukan prosedur analisis, dan prosedur audit lainnya yang memerlukan solusi dengan perangkat lunak. Sehingga auditor diharuskan untuk menjalani pelatihan profesional agar dapat mampu dan menguasai suatu sistem berbasis komputer dalam hal ini penerapan EDP audit.

Selain itu, Mulyadi (2014:58) dalam G Anggika (2018:49) menjelaskan bahwa dalam penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap auditor harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi dan independensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang diisyaratkan oleh prinsip etika. Nenden Dinah (2016:26) menjelaskan jika auditor memiliki independensi yang tinggi maka kepercayaan masyarakat pun bertambah.

Maka dari penjelasan di atas dapat diinterpretasikan adanya keterkaitan antara Kompetensi, Independensi Auditor dan Penerapan EDP Audit secara timbal balik. Pertama Seorang auditor dengan tingkat kompetensi yang baik harus ahli dalam menjalankan EDP Audit yang berfungsi membantu auditor dalam menjalankan tugasnya. Kedua Auditor harus memiliki tingkat kompetensi dan independensi yang baik agar lebih dipercaya oleh masyarakat.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji

Kompetensi seorang auditor dapat diperoleh dengan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing. Jika seorang auditor memiliki kompetensi yang cukup, baik pengetahuan maupun pengalamannya, maka auditor tersebut akan dengan mudah melakukan tugas – tugas auditnya termasuk menetapkan tingkat materialitas. Kecil kemungkinan auditor yang berkompeten salah menetapkan tingkat materialitas, karena auditor yang berkompeten pasti memikirkan dengan segala aspek yang ada terkait tingkat

materialitas suatu entitas(Wiwi Idawati).

Berdasarkan hasil tersebut dapat terlihat bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka auditor tersebut memiliki kemampuan lebih dalam melihat pola dan kecenderungan kesalahan yang mungkin muncul dalam laporan keuangan. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, auditor harus didukung Kantor Akuntan Publik untuk memberikan pelatihan, training, atau seminar guna meningkatkan pengetahuan auditor itu sendiri.

2.2.3 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji dalam Laporan Keuangan

Menurut Lestari dan Utama (2013) :

“Auditor yang independen dalam melakukan pekerjaannya tidak hanya berpaku pada satu kepentingan klien saja tetapi kepentingan banyak pihak diantaranya para pemegang saham dan para pemakai informasi auditan dan dalam meningkatkan kinerjanya dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Auditor yang profesional belum cukup hanya memiliki sikap profesionalisme, auditor juga harus memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan.”

Auditor yang memegang teguh independensi akan menghasilkan pertimbangan materialitas yang baik karena pertimbangan auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh dalam menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas walaupun terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut. Auditor yang independen akan tetap fokus ketika melakukan pengumpulan dan pengevaluasian bukti sehingga temuan audit sesuai dengan kondisi lapangan yang dapat menunjang keputusan auditor dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas

Berdasarkan hasil tersebut dapat terlihat semakin tinggi independensi

seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitasnya semakin baik. Hal ini harus didukung oleh Kantor Akuntan Publik untuk memberikan motivasi dalam menjaga independensi selama penugasan. Bila pertimbangan materialitas sudah baik maka opini yang dihasilkan juga pasti akan baik dan tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

2.2.4 Pengaruh Penerapan EDP Audit Terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji dalam Laporan Keuangan

Menurut Rukmini (2008) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pelaksanaan EDP audit dan resiko audit terhadap kinerja audit menyatakan bahwa pelaksanaan EDP audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi rendahnya kinerja audit yang dihasilkan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik pelaksanaan EDP audit maka semakin baik kinerjanya, hal ini dikarenakan semakin kuatnya bukti yang dikumpulkan.

Penerapan EDP audit, bagi sebagian auditor merupakan hal yang baru sehingga auditor harus mempelajari EDP audit itu sendiri sebagai suatu keahlian baru. Penerapan EDP Audit yang berkaitan dengan tingkat materialitas laporan keuangan, berkaitan pula dengan keahlian auditor dalam melaksanakan audit yang dibantu dengan komputer atau EDP audit. Apabila auditor tidak memiliki keahlian dalam pengauditan maka akan mengakibatkan kurangnya bukti yang dihasilkan karena pelaksanaan EDP audit bukan saja terhadap audit yang dilakukan secara konvensional tetapi juga harus dilakukan terhadap elektronik yang digunakan untuk menguji tingkat relevansinya, dan juga

digunakan untuk menguji tingkat materialitas laporan keuangan itu sendiri.

2.2.5 Pengaruh Kompetensi, Independensi dan EDP Audit terhadap Pertimbangan Materialitas Salah Saji Secara Simultan

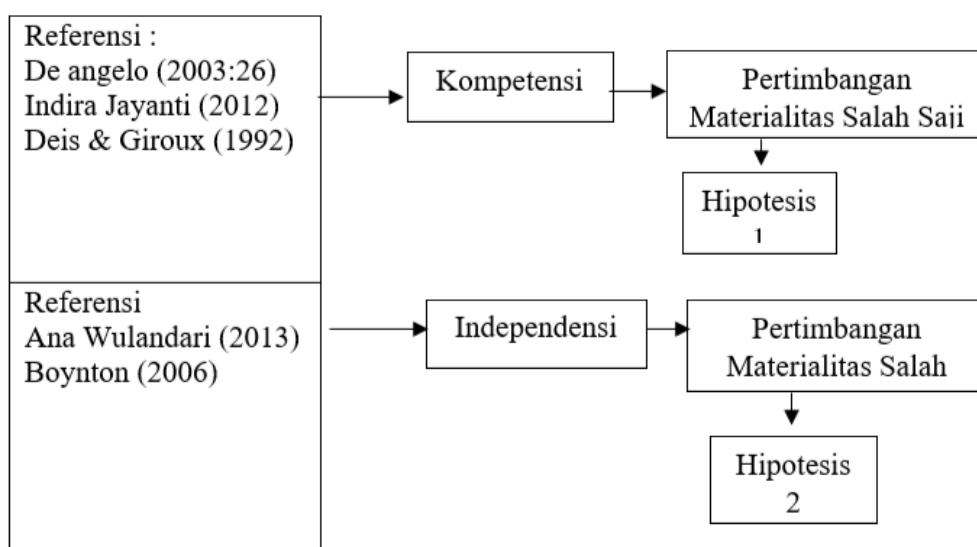
Telah dikemukakan di atas bahwa terdapat keterkaitan antara variabel kompetensi, independensi auditor dan penerapan EDP audit.

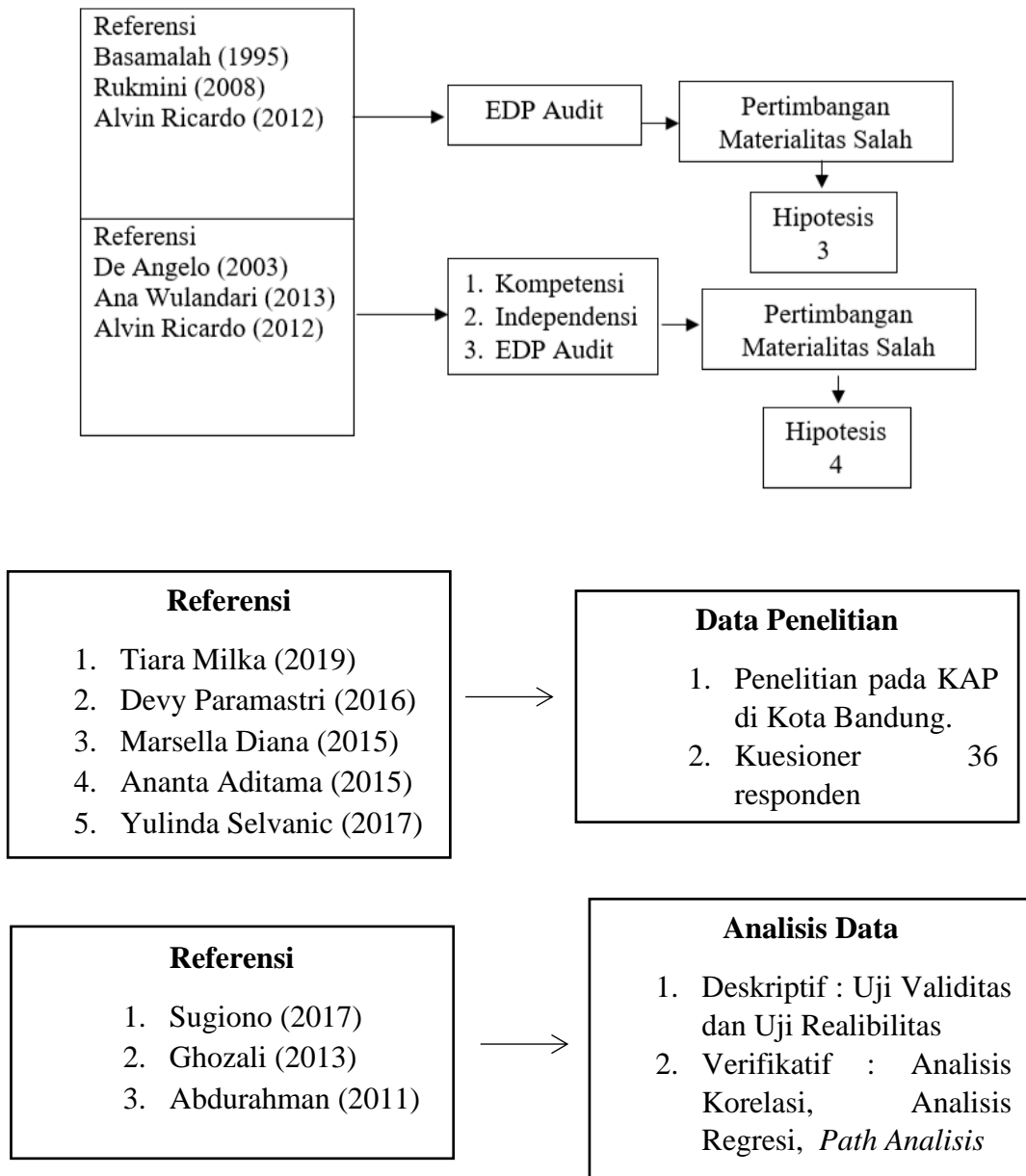
Selain itu telah dikemukakan juga bahwa terdapat pengaruh parsial masing-masing variabel di atas yaitu kompetensi, independensi dan EDP Audit terhadap pertimbangan materialitas salah saji. Maka dapat dipersepsikan jika auditor ahli dalam menggunakan EDP audit maka itu akan memudahkan tugas auditor sendiri. Karena semakin menggunakan komputer perhitungan salah saji lebih akurat dan menjadi lebih matematis. Lebih dari itu auditor harus memiliki tingkat kompetensi dan independensi yang baik agar lebih dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut memberikan implikasi bahwa dalam mempertimbangkan tingkat materialitas yang baik memerlukan independensi, kompetensi dan penerapan EDP yang baik pula yang baik pula.

2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

Landasan Teori			
Kompetensi : 1. Arens dkk (2016:463) 2. Sri Lastanti (2005) 3. Dwi Ratnadi dan Eka Desyanti (2006) 4. De Angelo (2003:26) 5. Lyle & Spencer (2004:92) 6. Indira Jayanti (2012) 7. Wooten (2003) 8. Deis & Giroux (1992)	Independensi : 1. Arens dkk (2012:74) 2. Tuanakotta (2011:64) 3. Soekrisno Agoes (2012:34-33) 4. Taylor (1997) 5. Mayangsari (2003) 6. Ana Wulandari (2013) 7. Boynton (2006)	EDP Audit : 1. Arens dkk (2016:463) 2. Purwono (2004) 3. Rukmini (2008) 4. Basamalah (1995) 5. Alvin Ricardo (2012) 6. Soekrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:226-227) 7. Ahmad Yani (2009-9) 8. Gododiyoto (2007:451-458)	Pertimbangan Materialitas Salah Saji: 1. Arens dkk (2008:320) 2. Mulyadi (2002) 3. Houghton et al (2011) 4. Arens (2005:234) 5. Ekawati (2011)





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ringkasan tabel dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Trisni Hapsari (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi	Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit dan Etika Auditor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa Kualitas Audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik, di mana kompetensi tersebut terdiri dari 2 dimensi

				yaitu pengalaman dan pengetahuan
2.	Hendro Wahyudi (2006)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan	Profesionalisme Auditor, Tingkat Materialitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Materialitas
3.	Reni Rukmini (2008)	Pengaruh Pelaksanaan EDP Audit dan Resiko Audit dan Kinerja Audit	Pelaksanaan EDP Audit, Resiko Audit, Kinerja Audit	Hasil penelitian menunjukkan ada Pelaksanaan EDP Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi rendahnya kinerja yang dihasilkan
4.	Ani Rohani (2008)	Pengaruh Profesionalisme Auditor, Gender dan Pengalaman Audit Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan	Profesionalisme Auditor, Gender, Pengalaman Audit, Tingkat Materialitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme auditor, Gender dan Pengalaman Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan Materialitas

2.3 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi auditor dan penerapan EDP (*Electronic Data Processing*) audit terhadap pengungkapan materialitas dalam audit laporan keuangan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁: Kompetensi Auditor audit berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas salah saji dalam laporan keuangan.

Ha₂: Independensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas salah saji dalam laporan keuangan.

Ha₃: Penerapan EDP Audit berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas salah saji dalam laporan keuangan.

Ha₄: Kompetensi Auditor, Independensi Auditor dan Penerapan EDP Audit berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas salah saji dalam laporan keuangan.